

**RENJA PERUBAHAN SKPD
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



**Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Panglima Batur No. 51 Kandangan 71211, Telpon (0517) 21242 Faxes. (0517) 21242**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dapat terselesaikan dengan baik.

Renja Perubahan SKPD Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RKPD Perubahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan secara bertahap dapat mencapai Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Semoga Rencana Kerja Perubahan SKPD ini dapat memberikan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Kandangan, 22 Juli 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kab. Hulu Sungai Selatan,



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690919 198602 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU . | 4 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD | 4 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 5 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 6 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 7 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 10 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 10 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD | 10 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 10 |
| BAB IV PENUTUP | 13 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah menyusun Rancangan Rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dimana sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sesuai RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023 yang visi **“Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sehati Plus CINTA “**. Berkaitan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kesempatan ini menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2016.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya didasarkan pada:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Asas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 7) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;
- 8) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Memberikan arah bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stackholders*) tentang rencana pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Menjadi kerangka acuan bagi dinas dalam upaya meningkatkan kualitas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari Renja Perubahan SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Keuangan Daerah serta Kesekretariatan;
- b. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;

- c. Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan Hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, menjelaskan secara rinci, Evaluasi pelaksana Renja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Tahun lalu dan capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dan Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan secara rinci, Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD), Program dan Kegiatan;

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Renja SKPD Tahun 2018 secara keseluruhan telah terakomodir dalam program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2018. Program Utama SKPD adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 10.174.439.600,- telah dilaksanakan dengan capaian Realisasi sebesar Rp. 8.159.021.589,- , secara rinci kegiatan – kegiatan program dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

| INDIKATOR | PAGU | REALISASI* | % |
|--|---------------|---------------|--------|
| 1. Penyusunan Standar Satuan Harga | 78.450.000 | 61,390,000 | 78.25 |
| 2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | 56.630.000 | 23,961,000 | 42.31 |
| 3. Penyusunan KUA dan PPAS | 44.240.000 | 17,610,000 | 39.81 |
| 4. Penyusunan APBD | 330.350.000 | 212,606,800 | 64.36 |
| 5. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 38.900.000 | 3,528,000 | 9.07 |
| 6. Penyusunan Perubahan APBD | 575.225.000 | 431,262,800 | 74.97 |
| 7. Penyusunan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 40.980.000 | 10,300,000 | 25.13 |
| 8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaks APBD | 60.072.000 | 57,354,000 | 95.48 |
| 9. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 50.072.000 | 46,590,000 | 93.05 |
| 10. Penyusunan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah | 451.060.000 | 354,500,000 | 78.59 |
| 11. Peningkatan Manajemen Aset /BMD | 256.106.000 | 146,907,000 | 57.36 |
| 12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | 172.835.000 | 128,775,610 | 74.51 |
| 13. Inventarisasi Barang/ Aset Daerah | 219.498.000 | 188,769,000 | 86.00 |
| 14. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan | 532.595.600 | 419,123,100 | 78.69 |
| 15. Pengamanan Barang/Aset Daerah | 590.375.000 | 224,067,280 | 37.95 |
| 16. Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis | 17.000.000 | 17,000,000 | 100.00 |
| 17. Penyediaan dok. PBB P2 dan BPHTB | 95.266.000 | 95,266,000 | 100.00 |
| 18. Penyediaan cetak, cetak SPTPD dan Karcis | 113.604.800 | 105,438,875 | 92.81 |
| 19. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda | 88.700.000 | 85,550,000 | 96.45 |
| 20. Penyusunan Laporan Triwulan Keuangan Daerah | 68.420.000 | 67,370,000 | 98.47 |
| 21. Penyaluran dana hibah dan bantuan social | 40.700.000 | 18,858,000 | 46.33 |
| 22. Peningkatan dan Pemeliharaan SIMDA | 39.900.000 | 36,230,000 | 90.80 |
| 23. Penyusunan RKBMD dan RKPBM | 54.286.400 | 39,146,760 | 72.11 |
| 24. Fasilitasi Majelis TP-TGR | 51.750.000 | 36,080,800 | 69.72 |
| 25. Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional | 5.563.053.800 | 4,879,444,600 | 87.71 |

| INDIKATOR | PAGU | REALISASI* | % |
|--|-------------|-------------|-------|
| 26. Pengelolaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional | 21.800.000 | 21,659,964 | 99.36 |
| 27. Pengelolaan Aset Rumah Dinas | 467.500.000 | 426,692,000 | 91.27 |
| 28. Pendampingan Penyusunan RKA | 21.370.000 | 3,540,000 | 6.43 |

2.1.1. Capaian Renstra SKPD

Capaian Renstra SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini, secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bakeuda Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target | Realisasi Capaian Kinerja |
|----|---|--|----------|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp | 126,371,479,600 | 131,622,310,850.62 |
| | | 2. Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD | Waktu | <09 Oktober 2018 | 03 Sept. 2018 |
| | | 3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Waktu | ≤ 31 Maret 2018 | 29 Maret 2018 |
| | | 4. Persentasi SP2D Dengan Sumber Dana dan Kode Rekening Yang Tepat | % | 100 | 100% |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan | % | 100 | 100% |
| 3. | Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima | 1. Hasil Evaluasi SAKIP | Predikat | BB | BB |

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan kebijakan pembangunan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan urusan pemerintahan (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Badan Keuangan Daerah mempunyai 5 (lima) Program yakni ; 4 (empat) program rutin dan 1 (satu) program operasional yang diimplementasikan dalam 45 (empat puluh lima) kegiatan. Kinerja yang sesuai SPM maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tidak ada pada Badan Keuangan daerah sedangkan Pelayanan yang ada di Badan Keuangan Daerah antara lain meliputi :

1) Pelayanan Penerbitan SP2D

Pelayanan Penerbitan SP2D bagi Aparatur Sipil Negara dan Pihak Ketiga/Masyarakat saat ini sudah berjalan baik dengan didukung oleh Aplikasi SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan.

2) Pembayaran PBB-P2 dan BPHTB

Pelayanan dalam pencetakan dan pembuatan PBB-P2 dan BPHTB serta pembayaran PBB-P2 dan BPHTB yang akan disetorkan ke Kas Daerah melalui aplikasi SIM PBB.

3) Penyaluran Bansos dan Hibah

Penyaluran Hibah dan bansos saat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyaluran Hibah dan Bansos.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- b. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Keuangan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut diatas ada beberapa isu penting (Isu Strategis) yaitu "Perwujudan kawasan ekonomi yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi merupakan tujuan dari integrasi ekonomi ASEAN. Terdapat enam elemen inti bagi kawasan ekonomi yang berdaya saing ini, yaitu: (i) kebijakan persaingan; (ii) perlindungan konsumen; (ii) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (iv) pembangunan infrastruktur; (v) perpajakan; (vi) ecommerce"

2.2. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Renja Perubahan SKPD Tahun 2019 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Perubahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sesuai Renstra Badan Keuangan Daerah.

Semua Program dan kegiatan yang sesuai RENSTRA Badan Keuangan Daerah Pengukuran Pencapaian Sasarannya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2019

| RANCANGAN AWAL | | | | | ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----------------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|---|---|--------------------|----------------|
| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | Perubahan 2019 | | NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | Perubahan 2019 | |
| | | | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | | | | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |
| 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Administrasi Perkantoran | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | | 1. | Administrasi Perkantoran | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | |
| | Penyediaan Jasa dan Adminiatrasi Perkantoran | Cakupan ATK, Koran, Cetak dan Penggandaan | 1 Tahun | 305.150.000 | | Penyediaan Jasa dan Adminiatrasi Perkantoran | Cakupan ATK, Koran, Cetak dan Penggandaan | 1 Tahun | 282.150.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening listrik, air, telpon dan internet | 8 Rekening | 151.200.000 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening listrik, air, telpon dan internet | 8 Rekening | 168.000.000 |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan minuman Rapat, Tamu dan Tausyiah | 605 Orang/Kali | 34.700.000 | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan minuman Rapat, Tamu dan Tausyiah | 605 Orang/Kali | 33.000.000 |
| | Rapat - Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan | Terlaksananya Koord. Dlm dan Luar Daerah | 1 Tahun | 938.000.000 | | Rapat - Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan | Terlaksananya Koord. Dlm dan Luar Daerah | 1 Tahun | 924.929.499 |
| | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya | Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak dan Penceramah | 179 OB/OK | 226.450.000 | | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya | Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak dan Penceramah | 179 OB/OK | 275.250.000 |
| | Penyebarluasan Informasi Tupoksi SKPD | Jumlah Pameran dan pawai pembangunan | 2 Kegiatan | 14.000.000 | | Penyebarluasan Informasi Tupoksi SKPD | Jumlah Pameran dan pawai pembangunan | 2 Kegiatan | 14.000.000 |
| 2. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | | 2. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor | 1 Paket | 198.959.400 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor | 1 Paket | 312.709.400 |
| | Pembangunan Gedung Kantor | Rehab/Pembangunan gedung kantor | 1 Buah | 949.850.000 | | Pembangunan Gedung Kantor | Rehab/Pembangunan gedung kantor | 1 Buah | 949.850.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor dlm Kondisi Baik | 65 Unit | 68.350.000 | | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor dlm Kondisi Baik | 65 Unit | 58.350.000 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Mobil dlm Kondisi Baik | 3 Unit | 174.000.000 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Mobil dlm Kondisi Baik | 3 Unit | 172.000.000 |
| 3. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Dokumen AKIP dan Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas | 100% | | 3. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Dokumen AKIP dan Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas | 100% | |
| | Penyusunan Dokumen Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan | 1 Laporan | 5.000.000 | | Penyusunan Dokumen Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan | 1 Laporan | 4.700.000 |
| | Penyusunan Dokumen AKIP | Jumlah Dokumen AKIP | 13 Laporan | 5.000.000 | | Penyusunan Dokumen AKIP | Jumlah Dokumen AKIP | 13 Laporan | 4.700.000 |
| 4. | Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | | 4. | Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | |
| | Majelis TP-TGR | Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar | 1 Tahun | 16.050.000 | | Majelis TP-TGR | Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar | 1 Tahun | 19.550.000 |
| 5. | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan | Jumlah Peningkatan Realisasi pajak daerah non PBB dan retribusi | 20.608.163.764,38 | | 5. | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan | Jumlah Peningkatan Realisasi pajak daerah non PBB dan retribusi | 20.608.163.764,38 | |
| | Pendataan Subjek / Objek Pajak Daerah | Jumlah Objek Pajak Daerah Yang Baru | 50 Objek Pajak | 5.451.000 | | Pendataan Subjek / Objek Pajak Daerah | Jumlah Objek Pajak Daerah Yang Baru | 50 Objek Pajak | - |
| | Penyediaan Karcis dan Blanko | Jumlah Jenis Karcis dan Blanko | 73 Jenis | 152.936.500 | | Penyediaan Karcis dan Blanko | Jumlah Jenis Karcis dan Blanko | 73 Jenis | 248.523.000 |
| | Promosi Pajak Daerah | Jumlah Promosi yang dilaksanakan | 3 Kali | 231.100.000 | | Promosi Pajak Daerah | Jumlah Promosi yang dilaksanakan | 3 Kali | 230.500.000 |
| 6. | Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB | Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB | 1.406.055.770,26 | | 6. | Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB | Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB | 1.406.055.770,26 | |
| | Pemutakhiran Data PBB - P2 dan BPHTB | Jumlah objek-objek PBB-P2 dan BPHTB | 67.328 WP | 274.927.000 | | Pemutakhiran Data PBB - P2 dan BPHTB | Jumlah objek-objek PBB-P2 dan BPHTB | 67.328 Wajib Pajak | 212.909.500 |
| | Promosi PBB dan BPHTB | Jumlah Promosi yang dilaksanakan | 2 Kali | 356.290.000 | | Promosi PBB dan BPHTB | Jumlah Promosi yang dilaksanakan | 2 Kali | 84.290.000 |
| | Pelayanan PBB dan BPHTB | Dokumen SPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu | 100% | 90.800.000 | | Pelayanan PBB dan BPHTB | Dokumen SPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu | 100% | 625.385.500 |

| RANCANGAN AWAL | | | | | ANALISA KEBUTUHAN | | | | |
|----------------|--|---|------------------------|----------------|-------------------|--|---|------------------------|----------------|
| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | 2019 | | NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | 2019 | |
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF |
| 7. | Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah | Lama waktu penyusunan RAPBD | 7 Bulan | | 7. | Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah | Lama waktu penyusunan RAPBD | 7 Bulan | |
| | Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS | 4 Dokumen | 107.648.000 | | Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS | 4 Dokumen | 41.994.000 |
| | Penyusunan Rancangan APBD | Jumlah Rancangan APBD | 2 Dokumen | 87.900.000 | | Penyusunan Rancangan APBD | Jumlah Rancangan APBD | 2 Dokumen | 109.900.000 |
| | Penyusunan Rancangan Perubahan APBD | Jumlah Rancangan Perubahan APBD | 2 Dokumen | 109.375.000 | | Penyusunan Rancangan Perubahan APBD | Jumlah Rancangan Perubahan APBD | 2 Dokumen | 119.800.000 |
| | Penyusunan Dokumen DPA | Jumlah DPA | 273 Dokumen | 44.870.000 | | Penyusunan Dokumen DPA | Jumlah DPA | 273 Dokumen | 46.820.000 |
| | Penyusunan Dokumen DPPA | Jumlah DPPA | 273 Dokumen | 49.260.000 | | Penyusunan Dokumen DPPA | Jumlah DPPA | 273 Dokumen | 51.400.000 |
| | Bimbingan Teknis Penyusunan RKA SKPD | Jumlah Bimbingan Teknis Yang Dilaksanakan | 1 kali | 13.750.000 | | Bimbingan Teknis Penyusunan RKA SKPD | Jumlah Bimbingan Teknis Yang Dilaksanakan | 1 kali | 9.850.000 |
| | Bimbingan Teknis Penyusunan RKAS | Jumlah Peserta Bimtek Peny. RKAS | 274 Sekolah | 50.475.000 | | Bimbingan Teknis Penyusunan RKAS | Jumlah Peserta Bimtek Peny. RKAS | 274 Sekolah | 31.410.000 |
| | Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD | Jumlah Dok. Pergeseran APBD | 3 Perbub | 254.700.000 | | Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD | Jumlah Dok. Pergeseran APBD | 3 Perbub | 41.350.000 |
| 8. | Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keu. Daerah | Persentasi Waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah | 100% | | 8. | Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keu. Daerah | Persentasi Waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah | 100% | |
| | Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda | Jumlah Rekonsiliasi Pengeluaran Kas yang dilaksanakan | 4 Kali | 30.800.000 | | Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda | Jumlah Rekonsiliasi Pengeluaran Kas yang dilaksanakan | 4 Kali | 30.800.000 |
| | Penyaluran Dana Hibah dan Bansos | Cakupan Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah kepada Yang Berhak sesuai ketentuan | 100% | 40.700.000,00 | | Penyaluran Dana Hibah dan Bansos | Hibah kepada Yang Berhak sesuai ketentuan | 100% | 27.300.000,00 |
| 9. | Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah | Laporan Keuangan Yang Memenuhi Aspek Kualitas | 100% | | 9. | Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah | Laporan Keuangan Yang Memenuhi Aspek Kualitas | 100% | |
| | Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS | Jumlah Rekonsiliasi BOS yang dilaksanakan | 4 Kali | 87.550.000 | | Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS | Jumlah Rekonsiliasi BOS yang dilaksanakan | 4 Kali | 50.560.000 |
| | Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi | Jumlah Rekonsiliasi JKN yang dilaksanakan | 4 Kali | 6.120.000 | | Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi | Jumlah Rekonsiliasi JKN yang dilaksanakan | 4 Kali | 6.120.000 |
| | Penyusunan Raperda ttg Pertanggung jawaban Pelaks APBD | Jumlah Draf Rancangan Rerda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Perda | 42.478.000 | | Penyusunan Raperda ttg Pertanggung jawaban Pelaks APBD | Jumlah Draf Rancangan Rerda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Perda | 54.660.000 |
| | Penyusunan Reper KDH ttg Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Draf Raperbub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Perbub | 54.660.000 | | Penyusunan Reper KDH ttg Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Draf Raperbub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Perbub | 42.478.000 |
| | Penyusunan Lap.Keu Pemda | Jumlah Draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 123.420.000 | | Penyusunan Lap.Keu Pemda | Jumlah Draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 90.220.000 |
| 10. | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan | 100% | | 10. | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan | 100% | |
| | Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah | Cakupan BMD yang dihapuskan dan dimusnahkan oleh SKPD | 100% | 129.575.000 | | Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah | Cakupan BMD yang dihapuskan dan dimusnahkan oleh SKPD | 100% | 151.375.000 |
| | Pemutakhiran Data Barang milik Daerah | Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD | 4 Kali | 183.575.000 | | Pemutakhiran Data Barang milik Daerah | Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD | 4 Kali | 183.575.000 |
| | Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset daerah | Jumlah Pengamanan Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah | 20 buah | 832.100.000 | | Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset daerah | Jumlah Pengamanan Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah | 20 buah | 725.400.000 |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan SIMDA | Jumlah SIMDA yang terpelihara | 2 SIMDA | 39.900.000 | | Peningkatan dan Pemeliharaan SIMDA | Jumlah SIMDA yang terpelihara | 2 SIMDA | 0 |
| | Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD | Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD dan RKPBMMD | 45 SKPD/KPA | 48.450.000 | | Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD | Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD dan RKPBMMD | 45 SKPD/KPA | 48.450.000 |
| | Pengadaan Aset Daerah | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas | 50 buah | 1.249.725.000 | | Pengadaan Aset Daerah | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas | 50 buah | 4.244.215.000 |
| | Pengelolaan Aset Rumah Dinas | Jumlah Rumah Dinas yang terpeliharaan | 4 buah | 587.100.000 | | Pengelolaan Aset Rumah Dinas | Jumlah Rumah Dinas yang terpeliharaan | 4 buah | 807.050.000 |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari 2 (dua) target kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah
2. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan Renstra SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tujuan dan sasaran.

3.2.1 Tujuan

Tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan RENSTRA adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

3.2.2 Sasaran

Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan RENSTRA adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sejalan dengan arah kebijakan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut diatas, dan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka secara rinci program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

**Daftar Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kab.HSS
Perubahan Tahun 2019**

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | Perubahan 2019 | |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Administrasi Perkantoran | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | |
| 1 | Penyediaan Jasa dan Adminiatrasi Perkantoran | Cakupan ATK, Koran, Cetak dan Penggandaan | 1 Tahun | 282.150.000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening listrik, air, telpon dan internet | 8 Rekening | 168.000.000 |
| 3 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan minuman Rapat, Tamu dan Tausyiah | 605 Orang/Kali | 33.000.000 |
| 4 | Rapat - Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan | Terlaksananya Koord. Dlm dan Luar Daerah | 1 Tahun | 924.929.499 |
| 5 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya | Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak dan Penceramah | 179 OB/OK | 275.250.000 |
| 6 | Penyebarluasan Informasi Tupoksi SKPD | Jumlah Pameran dan pawai pembangunan | 2 Kegiatan | 14.000.000 |
| II. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor | 1 Paket | 312.709.400 |
| 8 | Pembangunan Gedung Kantor | Rehab/Pembangunan gedung kantor | 1 Buah | 988.000.001 |
| 9 | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor dlm Kondisi Baik | 65 Unit | 58.350.000 |
| 10 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Mobil dlm Kondisi Baik | 3 Unit | 172.000.000 |
| III. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Dokumen AKIP dan Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas | 100% | |
| 11 | Penyusunan Dokumen Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan | 1 Laporan | 4.700.000 |
| 12 | Penyusunan Dokumen AKIP | Jumlah Dokumen AKIP | 7 Laporan | 4.700.000 |
| IV. | Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | |
| 13 | Majelis TP-TGR | Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Star | 1 Tahun | 19.550.000 |
| V. | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan | Jumlah Peningkatan Realisasi pajak daerah non PBB dan retribusi | 20.608.163.764,38 | |
| 14 | Pendataan Subjek / Objek Pajak Daerah | Jumlah Objek Pajak Daerah Yang Baru | 50 Objek Pajak | - |
| 15 | Penyediaan Karcis dan Blanko | Jumlah Jenis Karcis dan Blanko | 73 Jenis | 248.523.000 |
| 16 | Promosi Pajak Daerah | Jumlah Promosi yang dilaksanakan | 4 Kali | 230.500.000 |
| VI. | Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB | Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB | 1.406.055.770,26 | |
| 17 | Pemutakhiran Data PBB - P2 dan BPHTB | Jumlah objek-objek PBB-P2 dan BPHTB | 67.328 WP | 212.909.500 |
| 18 | Promosi PBB dan BPHTB | Jumlah Promosi yang dilaksanakan | 2 Kali | 84.290.000 |
| 19 | Pelayanan PBB dan BPHTB | Dokumen SPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu | 100% | 625.385.500 |
| VII. | Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah | Lama waktu penyusunan RAPBD | 7 Bulan | |
| 20 | Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS | 4 Dokumen | 41.994.000 |
| 21 | Penyusunan Rancangan APBD | Jumlah Rancangan APBD | 6 Dokumen | 109.900.000 |
| 22 | Penyusunan Rancangan Perubahan APBD | Jumlah Rancangan Perubahan APBD | 6 Dokumen | 119.800.000 |
| 23 | Penyusunan Dokumen DPA | Jumlah DPA | 370 dokumen | 46.820.000 |
| 24 | Penyusunan Dokumen DPPA | Jumlah DPPA | 74 Dokumen | 51.400.000 |
| 25 | Bimbingan Teknis Penyusunan RKA SKPD | Jumlah Bimbingan Teknis Yang Dilaksanakan | 73 Orang | 9.850.000 |
| 26 | Bimbingan Teknis Penyusunan RKAS | Jumlah Peserta Bimtek Peny. RKAS | 273 sekolah | 31.410.000 |
| 27 | Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD | Jumlah Dok. Pergeseran APBD | 3 dokumen | 41.350.000 |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | Perubahan 2019 | |
|------------|--|---|------------------------|----------------|
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keu. Daerah | Persentasi Waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah | 100% | |
| | Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda | Jumlah Rekonsiliasi Pengeluaran Kas yang dilaksanakan | 73 Dokumen | 30.800.000 |
| | Penyaluran Dana Hibah dan Bansos | dan Hibah kepada Yang Berhak sesuai ketentuan | 100% | 27.300.000,00 |
| 9. | Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah | Laporan Keuangan Yang Memenuhi Aspek Kualitas | 100% | |
| | Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS | Jumlah Rekonsiliasi BOS yang dilaksanakan | 273 dokumen | 50.560.000 |
| | Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi | Jumlah Rekonsiliasi JKN yang dilaksanakan | 21 Dokumen | 6.120.000 |
| | Penyusunan Raperda ttg Pertanggung jawaban Pelaks APBD | Jumlah Draf Rancangan Rerda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 dokumen | 54.660.000 |
| | Penyusunan Reper KDH ttg Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Draf Raperbub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 dokumen | 42.478.000 |
| | Penyusunan Lap.Keu Pemda | Jumlah Draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 90.220.000 |
| 10. | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan | 100% | |
| | Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah | Cakupan BMD yang dihapuskan dan dimusnahkan oleh SKPD | 500 item barang | 151.375.000 |
| | Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah | Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD | 4 Kali | 183.575.000 |
| | Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset daerah | Jumlah Pengamanan Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah | 25 persil | 725.400.000 |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan SIMDA | Jumlah SIMDA yang terpelihara | 2 SIMDA | 0 |
| | Penyusunan RKBMD dan RKPBM | Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD dan RKPBM | 2 dokumen | 48.450.000 |
| | Pengadaan Aset Daerah | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas | 62 buah | 4.244.215.000 |
| | Pengelolaan Aset Rumah Dinas | Jumlah Rumah Dinas yang terpeliharaan | 4 buah | 807.050.000 |

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dengan berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019. Renja Perubahan SKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) untuk tahun anggaran 2019 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, selanjutnya mengisyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tetap menerapkan prinsip – prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Badan Keuangan Daerah akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam Renja Perubahan SKPD TA.2019, dalam kaitan itu, diharapkan DPRD bersama masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahn TA.2019 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.